

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2021). *Berita Resmi Statistik : Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya 2020*. 04, 6. <https://surabayakota.bps.go.id/pressrelease/2021/03/18/236/pertumbuhan-ekonomi--kota-surabaya-2020.html>
- Bagaskoro, A. (2021). *Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Angkringan Di Kabupaten Klaten*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Cugono, M. (2020). *Analisis Pertumbuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Surabaya Rungkut*. Tesis, Surabaya: Universitas Widya Kartika.
- Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. New York: Harper Bussiness.
- Hariabrata, Y. (2021). *Upaya Pemerintah Provinsi Lampung Dalam Mensejahterakan Petani dan Industri Kopi Robusta Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Pada Petani Kopi dan Industri Kopi di Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Haryanto. (2020). *Eksistensi Warung Kopi Sebagai Konsep Ruang Publik di Kota Makassar*. Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Herlyana, E. (2012). Fenomena Coffee Shop Sebagai Gejala Gaya Hidup Baru Kaum Muda. *Thaqafiyat*, 13(1), 203.
- Katadata. (2018). *2021, Konsumsi Kopi Indonesia Diprediksi Mencapai 370 Ribu Ton*. Kata Data. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/31/2021-konsumsi-kopi-indonesia-diprediksi-mencapai-370-ribu-ton>
- Kusumasasti, I., Andarwati, A., & Hadiwidjojo, D. (2017). Pengaruh Kualitas Produk Dan Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Coffee Shop. *Ekonomi Bisnis*, 22(2), 123–129.
- Nugroho, A. S. (2021). *Penggalian Potensi Pajak Penghasilan Atas Usaha Coffee Shop di Kota Semarang*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara

STAN.

- Reni Lestari. (2021). *2021, Kemenperin Patok Pertumbuhan Industri Mamin 5 Persen*. Bisnis.Com.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210906/257/1438655/2021-kemenperin-patok-pertumbuhan-industri-mamin-5-persen>
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sasongko, D. (2020). *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>
- Spark System. (2007). *The Business Process Model*. Enterprise Architect.
- Widarti, P. (2019). *Pertumbuhan Kafe Berbasis Kopi Jatim Mencapai 18 Persen Setahun*. Bisnis.Com.
<https://surabaya.bisnis.com/read/20191001/531/1154444/pertumbuhan-kafe-berbasis-kopi-jatim-mencapai-18-persen-setahun>

2. Dokumen Publik atau Peraturan Perundang-Undangan

- Direktorat Jenderal Pajak. (2012). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-321/PJ/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-233/PJ/2012 Tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak Direktur Jenderal Pajak*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2008b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta:

Sekretariat Negara.

Pemerintah Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.